

TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MEDAN

IRVAN ALVHAREL GINTING MANIK

NPP. 33.0078

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: bestpart2882@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Rotzami, M. Si

Email: rotzami@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Information technology governance is essential for local government agencies managing strategic information and supporting the Electronic-Based Government System (SPBE). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan operates SIDINI and SEMPOA applications for early warning and socio-political issue management, yet no systematic IT governance maturity assessment has been conducted using a standardized framework such as COBIT 2019. **Purpose:** This study aims to analyze the maturity level of IT governance at Kesbangpol Kota Medan based on COBIT 2019, focusing on Governance (EDM) and Management (APO) domains, and to identify inhibiting factors and improvement needs. **Method:** This research uses a qualitative descriptive approach with semi-structured interviews of four key informants and analysis of organizational documents, evaluated using COBIT 2019 process capability indicators. **Result:** The findings indicate that the overall IT governance maturity is at Level 2 (Managed) on the lower bound with an average achievement of 51-57%. The largest gaps are in risk management (APO12), risk optimization (EDM03), and resource optimization (EDM04). **Conclusion:** Significant improvements are needed in formal policies, risk management, and information security to align with COBIT 2019 best practices and support effective SPBE implementation.

Keywords: Information Technology Governance, COBIT 2019, Maturity Level, SPBE, Kesbangpol

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Tata kelola teknologi informasi sangat penting bagi perangkat daerah yang mengelola informasi strategis dan mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan yang mengoperasikan aplikasi SIDINI dan SEMPOA untuk deteksi dini konflik dan pengelolaan isu sosial politik, belum pernah melakukan pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI secara sistematis menggunakan kerangka COBIT 2019. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kematangan tata kelola TI pada Badan Kesbangpol Kota Medan berdasarkan domain Governance (EDM) dan Management (APO) COBIT 2019 serta mengidentifikasi faktor penghambat dan kebutuhan perbaikan. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara semi-terstruktur terhadap empat

informan kunci dan studi dokumen organisasi. Analisis dilakukan dengan triangulasi data dan indikator kapabilitas proses COBIT 2019. **Hasil/Temuan:** Tingkat kematangan tata kelola TI secara keseluruhan berada pada Level 2 (Managed) batas bawah dengan rata-rata pencapaian 51-57%. Gap terbesar terdapat pada manajemen risiko (APO12), optimalisasi risiko (EDM03), dan optimalisasi sumber daya (EDM04). **Kesimpulan:** Tata kelola TI di Kesbangpol Kota Medan masih perlu perbaikan signifikan. Penguatan kebijakan formal, manajemen risiko, dan keamanan informasi diperlukan agar selaras dengan praktik terbaik COBIT 2019 dan mendukung pelaksanaan SPBE yang lebih baik.

Kata kunci: Tata Kelola Teknologi Informasi, COBIT 2019, Tingkat Kematangan, SPBE, Kesbangpol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada asas otonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui undang-undang tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai aspirasi masyarakatnya. Salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar namun memiliki peran sangat strategis adalah urusan kesatuan bangsa dan politik. Urusan ini berfungsi menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, memperkuat persatuan nasional, serta mendeteksi dini potensi konflik sosial politik (Fahrurrozi & Tuti, 2020).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan tersebut memiliki tugas pokok yang sangat kompleks, meliputi deteksi dini potensi konflik, penguatan ketahanan ideologi Pancasila, pemeliharaan keharmonisan masyarakat, pembinaan wawasan kebangsaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, serta fasilitasi kehidupan demokrasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas strategis ini, Kesbangpol Kota Medan mengoperasikan aplikasi SIDINI (Sistem Informasi Deteksi Dini) dan SEMPOA (Sistem Informasi dan Penilaian Organisasi Kemasyarakatan) yang mengelola data dan informasi sensitif terkait kondisi sosial politik daerah secara real-time.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini mewajibkan seluruh instansi pemerintahan untuk menerapkan tata kelola TI yang baik agar pelayanan publik dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis data yang andal (Chairunisa & Samboteng, 2024). Tata kelola TI yang matang menjadi prasyarat utama keberhasilan SPBE, karena tanpa kerangka tata kelola yang kuat, investasi teknologi informasi berpotensi tidak optimal dan menimbulkan berbagai risiko keamanan serta ketidakefektifan sistem (ISACA, 2019)

Meskipun demikian, hingga saat ini Badan Kesbangpol Kota Medan belum pernah melaksanakan pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI secara sistematis menggunakan kerangka kerja standar internasional seperti COBIT 2019. Ketiadaan pengukuran ini menyebabkan organisasi tidak memiliki gambaran yang objektif mengenai kekuatan dan kelemahan proses tata kelola TI, khususnya dalam domain Governance (EDM) dan Management (APO) (Larasati, 2023). Padahal, sebagai instansi yang menangani informasi strategis dan sensitif, Kesbangpol memerlukan tata kelola TI yang handal agar dapat mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah secara cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas Kota Medan.

Selain itu, karakteristik wilayah Kota Medan yang multikultural dan rawan konflik sosial politik menuntut pengelolaan informasi yang akurat, aman, dan responsif. Tanpa tata kelola TI yang matang,

risiko kebocoran data, gangguan sistem, serta ketidakakuratan informasi berpotensi meningkat dan dapat mengganggu stabilitas daerah (Tangka & Lompoliu, 2025). Oleh karena itu, pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan dan menyusun rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran.

Penelitian ini menjadi sangat relevan dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengukur tingkat kematangan tata kelola TI pada Badan Kesbangpol Kota Medan berdasarkan COBIT 2019 serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang kontekstual sesuai mandat dan tantangan organisasi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Meskipun Badan Kesbangpol Kota Medan telah memanfaatkan aplikasi SIDINI dan SEMPOA untuk mendukung tugas kewaspadaan dini dan pengelolaan isu sosial politik, terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam tata kelola teknologi informasinya. Pertama, belum adanya kerangka kebijakan tata kelola TI yang formal dan komprehensif. Pengelolaan TI masih bersifat parsial dan bergantung pada inisiatif individu serta koordinasi dengan Dinas Kominfo, tanpa didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku.

Kedua, manajemen risiko TI masih sangat lemah. Belum tersusunnya risk register, prosedur penanganan insiden, serta evaluasi risiko secara berkala menyebabkan organisasi rentan terhadap gangguan sistem, kebocoran data strategis, dan ketidakakuratan informasi yang dapat berdampak pada stabilitas daerah. Ketiga, optimalisasi sumber daya TI belum dilakukan secara sistematis, terlihat dari belum adanya evaluasi rutin terhadap efisiensi infrastruktur, anggaran, dan kompetensi SDM TI.

Kesenjangan ini semakin terlihat karena mayoritas penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada dinas teknis seperti Diskominfo atau layanan publik umum, sedangkan kajian mengenai tata kelola TI pada perangkat daerah dengan mandat strategis seperti Kesbangpol masih sangat minim. Belum pernah dilakukan pengukuran tingkat kematangan menggunakan COBIT 2019 pada domain EDM dan APO di instansi ini. Kondisi tersebut menyebabkan Kesbangpol Kota Medan belum memiliki peta jalan yang jelas untuk meningkatkan kualitas tata kelola TI sesuai standar SPBE.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan gambaran objektif tentang tingkat kematangan tata kelola TI serta rekomendasi perbaikan yang kontekstual.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian tentang tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan menjadi sangat penting dilakukan saat ini karena beberapa alasan utama. Secara keilmuan, penelitian ini mengisi kesenjangan kajian yang masih jarang dilakukan, yaitu pengukuran tata kelola TI pada perangkat daerah yang memiliki mandat strategis di bidang kewaspadaan dini, deteksi konflik, dan pengelolaan isu sosial politik menggunakan kerangka COBIT 2019. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dinas teknis atau layanan publik umum, sehingga konteks organisasi yang mengelola informasi sensitif dan strategis seperti Kesbangpol masih belum banyak dieksplorasi.

Dari sisi permasalahan, urgensi penelitian ini semakin mendesak karena Badan Kesbangpol Kota Medan mengelola data dan informasi yang sangat sensitif terkait potensi konflik sosial politik melalui aplikasi SIDINI dan SEMPOA. Tanpa tata kelola TI yang matang, organisasi rentan terhadap risiko kebocoran data, gangguan sistem, ketidakakuratan informasi, serta lambatnya respons terhadap isu-isu krusial yang dapat mengancam stabilitas daerah. Kondisi tata kelola yang masih berada pada Level 2 (*Managed*) dengan gap signifikan pada manajemen risiko dan keamanan informasi menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.

Secara praktis, hasil penelitian ini sangat penting bagi pemerintah daerah dan pengambil kebijakan di

Kota Medan. Temuan dan rekomendasi penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan tata kelola TI, memperkuat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas Badan Kesbangpol dalam menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat. Jika penelitian ini tidak dilakukan, maka kesenjangan tata kelola TI akan terus berlanjut, berpotensi menurunkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan kerentanan terhadap ancaman siber, serta menghambat upaya pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas sosial politik yang kondusif.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa kajian terdahulu mengenai tata kelola teknologi informasi di sektor pemerintahan menggunakan kerangka COBIT 2019. Berikut lima penelitian relevan yang menjadi bahan perbandingan:

1. **Budiana, Aryanto, & Sunarya, (2024)** dalam penelitian “Penilaian Tata Kelola dan Manajemen Infrastruktur TI Bank BPD XYZ Menggunakan COBIT 2019” menemukan bahwa subdomain EDM03, APO12, dan APO13 berada pada tingkat maturity Level 3 (Defined) dengan gap yang masih cukup signifikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan COBIT 2019 pada domain EDM dan APO, namun berbeda karena dilakukan di sektor perbankan dan menggunakan pendekatan kuantitatif.
2. **Safitri, Syafii, & Adi, (2021)** dalam studi “Identifikasi Level Pengelolaan Tata Kelola SIPERUMKIM Kota Salatiga berdasarkan COBIT 2019” menyimpulkan bahwa APO12 (Manage Risk) berada pada Level 1-2 dengan gap yang besar. Penelitian ini relevan karena dilakukan di perangkat daerah, namun objeknya adalah dinas perumahan dan tidak fokus pada fungsi kewaspadaan dini.
3. **Widayanti & Lestari, (2022)** meneliti “Tingkat Capability Tata Kelola TI pada Siakad Menggunakan Framework COBIT 2019” dan menemukan bahwa sistem berada pada Level 3 (Defined). Persamaan terletak pada penggunaan COBIT 2019, namun berbeda konteks karena dilakukan di perguruan tinggi dengan fokus pada layanan akademik.
4. **Yuan Mambu et al., (2025)** dalam “IT Governance Maturity Assessment Using COBIT 2019 for System Enhancement and Strategic Decision Support” menemukan gap signifikan pada beberapa subdomain manajemen. Penelitian ini relevan dalam metode gap analysis, tetapi dilakukan di sektor swasta (industri air minum).
5. **Daulay, Dewi, & Praditya, (2024)** menganalisis tingkat kematangan tata kelola TI pada PT Nusantara Turbin dan Propulsi menggunakan COBIT 2019 dan menemukan bahwa banyak proses masih berada di Level 2. Penelitian ini mendukung pentingnya domain EDM dan APO, namun dilakukan di sektor swasta.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang jelas, yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik mengukur tingkat kematangan tata kelola TI pada Badan Kesbangpol Kota Medan menggunakan COBIT 2019 domain EDM dan APO dengan pendekatan kualitatif yang mendalam pada konteks kewaspadaan dini dan isu sosial politik.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena merupakan kajian pertama yang mengukur tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan menggunakan kerangka COBIT 2019 khususnya domain Governance (EDM) dan Management (APO) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya dilakukan di dinas teknis, perguruan tinggi, atau sektor swasta, penelitian ini mengkaji

konteks perangkat daerah yang memiliki mandat strategis di bidang kewaspadaan dini konflik dan pengelolaan isu sosial politik, serta menyajikan rekomendasi perbaikan yang sangat kontekstual sesuai karakteristik organisasi.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan berdasarkan domain Governance (EDM) dan Management (APO) kerangka kerja COBIT 2019, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan kebutuhan perbaikan yang diperlukan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan secara mendalam kondisi tata kelola teknologi informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan serta menganalisis tingkat kematangannya berdasarkan kerangka COBIT 2019.

Operasionalisasi konsep dilakukan dengan mengacu pada indikator proses COBIT 2019 pada domain Governance (EDM) dan Management (APO), meliputi EDM01, EDM02, EDM03, EDM04, APO02, APO12, dan APO13.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap empat informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Badan, Kasubbag yang membidangi TI, Sekretaris Badan, dan Tenaga Ahli TI. Data sekunder berasal dari dokumen organisasi, SOP, laporan, dan bukti pengelolaan sistem informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, triangulasi (antara hasil wawancara dan dokumen), serta penarikan kesimpulan dengan merujuk pada indikator kapabilitas proses COBIT 2019. Penilaian tingkat kematangan dilakukan dengan menghitung persentase pemenuhan indikator dan mengklasifikasikannya ke dalam Level 0 sampai Level 5 COBIT 2019.

Penelitian dilaksanakan di Badan Kesbangpol Kota Medan pada periode Januari hingga Maret 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Tata Kelola Teknologi Informasi di Badan Kesbangpol Kota Medan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam deteksi dini potensi konflik dan pengelolaan isu sosial politik. Dua aplikasi utama yang digunakan adalah SIDINI (Sistem Informasi Deteksi Dini) dan SEMPOA (Sistem Informasi dan Penilaian Organisasi Kemasyarakatan). Kedua aplikasi ini berfungsi mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara real-time dari berbagai wilayah di Kota Medan.

Secara umum, pengelolaan TI di Kesbangpol masih bersifat operasional dan bergantung pada koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan, terutama dalam hal infrastruktur server, jaringan, dan pemeliharaan sistem. Belum terdapat kebijakan tata kelola TI yang berdiri sendiri, SOP khusus pengelolaan risiko, serta standar keamanan informasi yang komprehensif. Pembagian peran dan tanggung jawab TI juga masih terintegrasi dalam struktur organisasi umum, belum dibuatkan secara khusus untuk unit TI.

Meskipun demikian, pimpinan Badan telah menunjukkan komitmen yang cukup baik terhadap pemanfaatan TI, terlihat dari dukungan anggaran tahunan untuk pemeliharaan aplikasi dan pelatihan

pengguna. Namun, secara keseluruhan, tata kelola TI di Kesbangpol Kota Medan masih berada pada tahap awal pengelolaan dan belum sepenuhnya terstandardisasi sesuai praktik terbaik COBIT 2019.

3.2. Hasil Analisis Domain Governance (EDM)

Domain Governance (EDM) pada COBIT 2019 berfokus pada proses *Evaluate, Direct, and Monitor* yang menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi organisasi. Penelitian ini menganalisis empat subdomain EDM yaitu EDM01, EDM02, EDM03, dan EDM04.

EDM01 (*Ensure Governance Framework Setting and Maintenance*) memperoleh rata-rata persentase pemenuhan sebesar 55,56% atau Level 2 (*Managed*). Kerangka tata kelola TI sudah ada secara informal melalui struktur organisasi, namun belum memiliki dokumen kebijakan khusus yang disahkan pimpinan.

EDM02 (*Ensure Benefits Delivery*) juga berada pada Level 2 (*Managed*) dengan rata-rata 55,56%. Aplikasi SIDINI dan SEMPOA telah memberikan manfaat strategis dalam deteksi dini, namun pengukuran manfaat masih bersifat kualitatif dan belum terdokumentasi secara formal dengan indikator kinerja.

EDM03 (*Ensure Risk Optimization*) berada pada Level 1 (*Performed*) dengan rata-rata 47,22%. Risiko TI sudah disadari, namun belum terdapat risk register dan rencana mitigasi yang sistematis (ISACA, 2019).

EDM04 (*Ensure Resource Optimization*) memperoleh nilai terendah di domain EDM yaitu 44,44% atau Level 1 (*Performed*). Alokasi sumber daya TI dilakukan melalui mekanisme anggaran tahunan, tetapi evaluasi efisiensi dan optimalisasi belum dilakukan secara rutin.

Secara keseluruhan, Domain Governance (EDM) berada pada Level 2 (*Managed*) batas bawah dengan rata-rata 50,69%. Hal ini menunjukkan bahwa arahan dan pengawasan pimpinan terhadap tata kelola TI sudah mulai berjalan, namun masih memerlukan standarisasi dan dokumentasi yang lebih baik.

Tabel 1.

Rekapitulasi Hasil Penilaian Domain Governance (EDM)

Subdomain	Rata-rata Persentase	Capability Level	Kategori
EDM01	55,56%	Level 2	Managed
EDM02	55,56%	Level 2	Managed
EDM03	47,22%	Level 1	Performed
EDM04	44,44%	Level 1	Performed
Rata-rata EDM	50,69%	Level 2	Managed(bawah)

Sumber: Diolah peneliti, 2026

3.3. Hasil Analisis Domain Management (APO)

Domain Management (APO) pada COBIT 2019 berfokus pada perencanaan, penyesuaian, dan pengorganisasian teknologi informasi agar mendukung tujuan organisasi. Penelitian ini menganalisis tiga subdomain APO yaitu APO02, APO12, dan APO13.

APO02 (*Manage Strategy*) memperoleh rata-rata persentase tertinggi sebesar 61,11% atau Level 2 (*Managed*). Strategi pemanfaatan TI sudah terintegrasi dalam Renstra dan Renja Kesbangpol, meskipun belum terdapat dokumen Rencana Strategis TI yang berdiri sendiri dan indikator kinerja yang spesifik.

APO12 (*Manage Risk*) merupakan subdomain dengan nilai terendah, yaitu 36,11% atau Level 1 (*Performed*). Prosedur manajemen risiko TI belum tersusun secara formal, risk register belum ada,

dan penanganan insiden masih bersifat reaktif serta bergantung pada pengalaman personel. APO13 (Manage Security) berada pada Level 2 (Managed) dengan rata-rata 58,33%. Beberapa kontrol keamanan seperti pembatasan hak akses dan backup data sudah diterapkan, namun belum didukung oleh kebijakan keamanan informasi yang komprehensif dan program kesadaran keamanan (security awareness) yang rutin.

Secara keseluruhan, Domain Management (APO) berada pada Level 2 (Managed) batas bawah dengan rata-rata 51,85%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan TI sudah mulai berjalan, tetapi masih lemah pada aspek manajemen risiko.

Tabel 2.

Rekapitulasi Hasil Penilaian Domain Management (APO)

Subdomain	Rata-rata Persentase	Capability Level	Kategori
APO02	61,11%	Level 2	Managed
APO12	36,11%	Level 1	Performed
APO13	58,33%	Level 2	Managed
Rata-rata APO	51,85%	Level 2	Managed(bawah)

Sumber: Diolah peneliti, 2026

3.4. Tingkat Kapabilitas Keseluruhan dan Analisis Gap

Berdasarkan hasil penilaian terhadap tujuh subdomain COBIT 2019 yang diteliti, tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan secara keseluruhan berada pada Level 2 (*Managed*) batas bawah. Rata-rata pencapaian hanya mencapai sekitar 51-57% dari target ideal. Hal ini mengindikasikan bahwa proses tata kelola TI di Kesbangpol sudah mulai dikenali dan dikelola secara operasional, namun masih jauh dari kondisi terstandarisasi, terdokumentasi dengan baik, serta dievaluasi secara konsisten sesuai praktik terbaik COBIT 2019.

Tabel 3.

Rekapitulasi Hasil Penilaian Domain Management (APO)

Domain / Subdomain	Rata-rata Persentase	Capability Level	Kategori	Gap terhadap Level 3
EDM01 Governance Framework	55,56%	Level 2	Managed	27,77%
EDM02 Benefits Delivery	55,56%	Level 2	Managed	27,77%
EDM03 Risk Optimization	47,22%	Level 1	Performed	36,11%
EDM04 Resource Optimization	44,44%	Level 1	Performed	38,89%
APO02 Manage Strategy	61,11%	Level 2	Managed	22,22%
APO12	36,11%	Level 1	Performed	47,22%

Manage Risk				
APO13				
Manage Security	58,33%	Level 2	Managed	25,00%
Rata-rata Keseluruhan	51,27%	Level 2 (bawah)	Managed	38,33%

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Dari tabel rekapitulasi tersebut, terlihat jelas bahwa subdomain APO12 (Manage Risk) memiliki kesenjangan terbesar (47,22%), diikuti oleh EDM04 (Resource Optimization) dan EDM03 (Risk Optimization). Sementara itu, APO02 (Manage Strategy) menjadi subdomain dengan pencapaian relatif lebih baik karena strategi TI sudah mulai terintegrasi dalam dokumen perencanaan organisasi seperti Renstra dan Renja (Elina, 2021).

Secara keseluruhan, terdapat gap sebesar 38,33% dari target Level 3 (Defined) yang seharusnya dicapai oleh instansi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi SIDINI dan SEMPOA telah beroperasi, fondasi tata kelola TI masih lemah, terutama pada aspek formalisasi kebijakan, manajemen risiko, dan optimalisasi sumber daya. Kesenjangan ini berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan informasi strategis serta meningkatkan risiko keamanan data yang sensitif.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan secara keseluruhan masih berada pada Level 2 (Managed) batas bawah dengan rata-rata pencapaian hanya sekitar 51-57%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses tata kelola TI sudah mulai berjalan dan dikelola secara operasional, namun belum terstandarisasi, terdokumentasi secara formal, serta belum dievaluasi secara berkala dan sistematis sesuai dengan praktik terbaik COBIT 2019 (ISACA, 2019). Subdomain APO02 (Manage Strategy) menjadi kekuatan relatif dengan pencapaian 61,11%, karena strategi pemanfaatan aplikasi SIDINI dan SEMPOA telah terintegrasi dalam Renstra dan Renja Kesbangpol. Namun, temuan paling mengkhawatirkan adalah subdomain APO12 (Manage Risk) yang hanya mencapai 36,11% (Level 1), diikuti EDM03 dan EDM04. Kelemahan ini sangat signifikan mengingat Kesbangpol menangani informasi strategis dan sensitif yang berhubungan langsung dengan stabilitas sosial politik Kota Medan. Menurut ISACA (2019), kurangnya manajemen risiko TI yang matang dapat menyebabkan gangguan kontinuitas layanan, kebocoran data rahasia, dan kegagalan deteksi dini potensi konflik.

Dari analisis dimensi People-Process-Technology, kelemahan paling dominan berada pada dimensi Process. Prosedur operasional, SOP, risk register, dan kebijakan keamanan informasi masih belum tersusun secara formal. Dimensi People juga menunjukkan tantangan berupa ketergantungan yang tinggi pada beberapa personel kunci serta rendahnya kesadaran keamanan informasi di kalangan pegawai. Sementara dimensi Technology relatif lebih baik karena adanya dukungan infrastruktur dari Dinas Kominfo, namun tanpa dukungan proses dan SDM yang memadai, investasi teknologi tersebut belum memberikan nilai tambah yang optimal (Budiman, 2024; Daulay et al., 2024)

Temuan ini sejalan dengan penelitian Safitri et al., (2021) dan Widayanti & Lestari, (2022) yang juga menemukan bahwa perangkat daerah di Indonesia umumnya masih lemah pada aspek manajemen risiko dan optimalisasi sumber daya TI. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru karena dilakukan pada konteks organisasi dengan mandat strategis kewaspadaan dini, yang jarang dikaji sebelumnya. Rendahnya tingkat kematangan ini berpotensi menghambat pelaksanaan SPBE di tingkat

daerah serta meningkatkan kerentanan terhadap ancaman siber dan ketidakakuratan informasi strategis.

Secara keseluruhan, diskusi temuan ini menegaskan urgensi transformasi tata kelola TI dari pendekatan reaktif menuju pendekatan yang lebih proaktif, terstruktur, dan berbasis risiko agar Kesbangpol Kota Medan dapat menjalankan fungsi strategisnya secara lebih efektif dan akuntabel.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama mengenai tingkat kematangan, penelitian ini juga menemukan beberapa hal menarik yang patut dicermati. Pertama, terdapat variasi persepsi yang signifikan antar informan. Tenaga Ahli TI cenderung memberikan penilaian lebih optimis (68,33%) karena melihat implementasi teknis secara langsung, sementara Sekretaris Badan memberikan penilaian paling rendah (38%). Hal ini menunjukkan adanya *gap of perception* antara level teknis dan level manajerial, yang umum terjadi pada organisasi pemerintahan ketika tata kelola TI belum terintegrasi dengan baik (Wijaya dkk., t.t.).

Kedua, meskipun tata kelola TI masih rendah, aplikasi SIDINI dan SEMPOA telah memberikan manfaat operasional yang nyata dalam mendukung deteksi dini. Hal ini membuktikan bahwa adopsi teknologi di Kesbangpol sudah berjalan, namun belum didukung oleh tata kelola yang memadai — sebuah fenomena yang disebut sebagai “*technology without governance*”. Kondisi ini sangat berisiko karena informasi yang dihasilkan bersifat sensitif dan berpotensi memengaruhi stabilitas daerah.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa koordinasi dengan Dinas Kominfo menjadi faktor penyangga utama saat ini. Hampir seluruh infrastruktur dan pemeliharaan teknis bergantung pada Diskominfo. Meskipun efektif dalam jangka pendek, ketergantungan ini menciptakan risiko *single point of failure* dan mengurangi kemandirian Kesbangpol dalam mengelola sistem informasi strategisnya.

Temuan menarik lainnya adalah potensi besar pemanfaatan teknologi untuk mendukung fungsi kewaspadaan dini di kota multikultural seperti Medan. Jika tata kelola TI ditingkatkan, aplikasi SIDINI dan SEMPOA berpotensi menjadi model *early warning system* berbasis data yang dapat direplikasi di daerah lain.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan secara keseluruhan berada pada Level 2 (Managed) dengan rata-rata pencapaian sekitar 51,27%–57% dari target ideal 95%, sehingga masih tergolong perlu perbaikan yang signifikan. Pada domain Governance (EDM), subdomain EDM01 dan EDM02 berada pada Level 2, sedangkan EDM03 dan EDM04 masih pada Level 1 (Performed). Sementara itu pada domain Management (APO), APO02 (Manage Strategy) mencapai capaian tertinggi (61,11% - Level 2), APO13 (Manage Security) berada pada Level 2, dan APO12 (Manage Risk) menjadi yang terendah (36,11% - Level 1). Meskipun Badan Kesbangpol Kota Medan telah memanfaatkan aplikasi SIDINI dan SEMPOA untuk mendukung fungsi kewaspadaan dini dan pengelolaan isu sosial politik, tata kelola TI-nya belum sepenuhnya selaras dengan praktik terbaik COBIT 2019. Kelemahan utama terletak pada manajemen risiko TI, dokumentasi kebijakan formal, pengukuran manfaat strategis, serta optimalisasi sumber daya, sementara kekuatan utama berada pada dukungan pimpinan dan penerapan operasional serta keamanan dasar. Oleh karena itu, direkomendasikan penyusunan kebijakan tata kelola TI yang komprehensif, pembuatan Risk Register dan SOP manajemen risiko, penyusunan indikator manfaat TI yang terukur, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan tata kelola dan keamanan informasi agar kapabilitas tata kelola TI dapat meningkat menuju Level 3 (Defined) dan mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara lebih optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: (1) hanya

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jumlah informan yang terbatas (4 orang); (2) fokus hanya pada domain EDM dan APO sehingga tidak mencakup seluruh domain COBIT 2019; (3) pengukuran dilakukan pada satu periode waktu tertentu sehingga belum menggambarkan dinamika perubahan; dan (4) penelitian bersifat studi kasus pada satu instansi sehingga generalisasi hasil terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian lanjutan disarankan untuk: (1) melakukan pengukuran tingkat kematangan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner yang lebih luas dan melibatkan seluruh domain COBIT 2019; (2) membandingkan tingkat kematangan tata kelola TI antar Badan Kesbangpol di beberapa kota/kabupaten; (3) menyusun roadmap implementasi rekomendasi dan mengukur efektivitasnya setelah intervensi; serta (4) mengintegrasikan kerangka COBIT 2019 dengan kerangka penilaian SPBE Kementerian PANRB.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ramli Ginting Manik dan Ibunda Rasmi Julianti Selian, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dosen Pembimbing, Bapak Drs. Rotzami, M.Si., beserta seluruh dosen dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah membimbing dan membentuk penulis selama menempuh pendidikan. Kepada kekasih tercinta Ella Ivana Tarigan serta seluruh keluarga besar angkatan XXXIII IPDN Sumatera Utara yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi amal kebaikan yang mendapat balasan dari Allah SWT.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budiana, I. W., Aryanto, K. Y. E., & Sunarya, I. M. G. (2024). Penilaian Tata Kelola dan Manajemen Infrastruktur TI Bank BPD XYZ Menggunakan COBIT 2019. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(1), 149–161. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i1.1043>
- Budiman, M. N. (2024). Pemanfaatan Aplikasi WargaKu Sebagai Praktek Digitalisasi Public Relations Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Audiens*, 5(1), 101–113. <https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.345>
- Chairunisa, F., & Samboteng, L. (2024). PRINSIP-PRINSIP DIGITALISASI LAYANAN INPASSING DOSEN NON-ASN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IX. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Daulay, M. D., Dewi, F., & Praditya, D. (2024). Analisis Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 2019 Pada PT Nusantara Turbin Dan Propulsi. *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2), 595–602. <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.4537>
- Elina, R. (2021). Evaluasi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan Framework CobIT. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(10), 1488–1504. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i10.435>
- Fahrurozi, & Tuti, R. (2020). Efektifitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan.

JURNAL MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK, 5.

ISACA. (2019). *COBIT 2019 Framework Governance and Management Objectives*.

Larasati, D. C. (2023). DIGITALISASI PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SAMBAT ONLINE. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 89–97. <https://doi.org/10.33366/JISIP.V12I1.2601>

Safitri, A., Syafii, I., & Adi, K. (2021). Identifikasi Level Pengelolaan Tata Kelola SIPERUMKIM Kota Salatiga berdasarkan COBIT 2019. *Jurnal RESTI*, 5(3), 429–438. <https://doi.org/10.29207/resti.v5i3.3060>

Tangka, G. M. W., & Lompoliu, E. (2025). Optimizing IT Governance in BTS.id: A COBIT 2019-Based Analysis of Design Factors. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 5(2), 699–710. <https://doi.org/10.57152/malcom.v5i2.1997>

Widayanti, R., & Lestari, G. N. V. (2022). Tingkat Capability Tata Kelola TI pada SIAKAD Menggunakan Framework COBIT 2019. *Sebatik*, 26(1), 377–386. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1854>

Yuan Mambu, J., Lumingkewas, C., Morris William Tangka, G., Klabat, U., Arnold Mononutu, J., Bawah, A., ... Utara, S. (2025). IT Governance Maturity Assessment Using COBIT 2019 for System Enhancement and Strategic Decision Support. *COGITO Smart Journal*, 11(1).